

## IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA KAMPUNG MESJID KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Fadillah Aulia Akbar<sup>1</sup>, Khairunnisah Lubis<sup>2</sup>, Rudi Salam Sinaga<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

Email Korespondensi: fadillahakbar758@gmail.com

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty in Kampung Mesjid Village, Kualuh Hilir Subdistrict, Labuhan Batu Utara Regency. The study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving key informants such as the village head, PKH officers, and program beneficiaries. George C. Edward III's implementation theory was used as the analytical framework, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of PKH in Kampung Mesjid Village has had a positive impact, particularly in improving access to education and healthcare for poor families. However, several challenges remain, including inaccurate beneficiary data, limited resources, and the apathetic attitude of some program participants. This study provides recommendations to enhance program effectiveness, including optimizing data collection, improving human resource capacity, and strengthening communication among stakeholders.

**Keywords:** Implementation, Family Hope Program, Poverty, Kampung Mesjid Village.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan informan utama seperti kepala desa, petugas PKH, dan masyarakat penerima manfaat program. Teori implementasi George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Kampung Mesjid telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun, terdapat beberapa kendala seperti data penerima manfaat yang belum akurat, minimnya sumber daya, dan sikap apatis sebagian peserta program. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program, termasuk optimalisasi pendataan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan komunikasi antara pihak terkait.

**Kata kunci:** Implementasi, Program Keluarga Harapan, Pendamping PKH, Kampung Mesjid.

### PENDAHULUAN

Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit, namun di beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam segi hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Mardiatillah et al., 2021:280).

Pada perkembangannya, di satu sisi pemerintahan Indonesia terus berkomitmen untuk menempatkan pembangunan manusia dalam mengentaskan kemiskinan sebagai fokus utama dari strategi membangun kesejahteraan rakyat. Komitmen ini telah dituangkan dalam agenda konstitusional sebagai wujud

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

400

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

kepedulian pemerintah dalam proses pembangunan diantaranya dalam tingkat nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945/amandemen sebagai landasan idil dan konstitusional untuk penanggulangan kemiskinan, selain itu upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional (Choiriyah, 2018:19).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga 19 Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan jangka panjang diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan (Kominfo, 2016:18-19).

Desa Kampung Mesjid merupakan salah satu desa pada Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan luas 20,22 km<sup>2</sup>, dengan total penduduk 5.122 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 252,82 per Km<sup>2</sup>. Rata-rata jenis pekerjaan penduduknya adalah pertanian 95,8 dengan 1325 KK (BPS-Labuhanbatu Utara, 2022:29). Desa Kampung Mesjid memiliki beberapa fasilitas umum seperti Masjid yang berjumlah 5 masjid dan musholah yang berjumlah 6 musholah.

Studi Kecamatan Kualuh Hilir yang memiliki total penduduk miskin yang paling banyak menjadikan pemerintah kabupaten Labuhan Batu Utara membuat peraturan untuk menyalurkan bantuan dana desa, tidak terkecuali adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat membantu setiap penduduk desa Kampung Mesjid yang masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan pekerjaan masyarakat sebagian besar hanya sebagai petani, dan masih berpenghasilan di bawah rata-rata.

Berdasarkan data dan fenomena masalah, peneliti ingin meninjau dan mengkaji kembali bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terlaksana di desa Kampung Mesjid, bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan dalam implementasi program PKH, apa saja hal yang menjadi faktor-faktor penghambat serta pendukung program PKH serta melihat bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang pada Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara dimulai dari bulan Maret 2023 sampai bulan Juli 2023. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini terdiri atas 9 orang, yaitu 1 orang Kepala Desa Kampung Masjid sebagai informan kunci, 1 orang Kasi Pelayanan sebagai informan utama, 2 orang Petugas PKH sebagai informan utama, dan 5 orang Masyarakat sebagai informan pendukung. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis secara triangulasi, analisis data bersifat inuktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

401

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



## PEMBAHASAN

Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan yang telah sebelumnya dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi secara besar-besaran dipengaruhi oleh jenis tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan-tujuan tersebut dirumuskan. Teori dan Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dalam pandangan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi dengan penjelasan sebagai berikut (Yurenji et al., 2022:63):

1. Komunikasi (*Communication*)

Semakin banyak yang harus dijangkau dengan komunikasi-komunikasi, maka semakin besar kemungkinan kehilangan beberapa diantaranya; dan semakin banyak birokrasi yang dilewati, maka semakin besar pula peluang perintah tersebut diabaikan dan terdistorsi. Dalam pelaksanaan PKH komunikasi penting perannya dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan program terlebih program ini merupakan program dari pemerintah pusat yang membutuhkan suatu bentuk penyampaian informasi yang baik hingga sampai kepada lapisan yang paling bawah.

2. Sumber-Sumber (*Resources*)

Sumber-sumber yang dimaksud meliputi staf yang memadai, dan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Staf yang memiliki kecakapan dan jumlah memadai akan mendorong implementasi berjalan baik, namun sebaliknya jika kualitas staf rendah dan jumlah terbatas, maka pelayanan menjadi terhambat. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material, dan metoda. Program Keluarga Harapan yang menjadi proyek dari Pemerintah Pusat tentunya membutuhkan sumber daya yang sangat besar, terlebih lagi program ini menjadi program nasional yang sudah dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia.

3. Kecenderungan-kecenderungan (*Dispositions*)

Faktor disposisi lebih menitikberatkan pada sikap dan perilaku dari implemetor, kebijakan atau program akan berjalan dengan baik apabila implementor memiliki sikap dan komitmen sesuai dengan pembuat kebijakan. Implementor dalam Program Keluarga Harapan meliputi Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Utara, PPKH Kabupaten, PPKH Kecamatan dan peserta PKH.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi menurut Edwards memiliki dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. SOP menjadi sebuah pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi yang memberikan perbedaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. Sama halnya dengan organisasi, Program Keluarga Harapan juga memiliki struktur birokrasi muai dari Pemerintah Pusat sampai pada unit paling akhir yaitu PPKH Kecamatan.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu (Kemenkeu, 2017:6):

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](http://admin@lkispol.or.id)

402

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15)

5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengandisabilitas.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Kecamatan Kualuh Hilir merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Secara geografis, Kecamatan Aek Kuo berada pada 2.153 Lintang Utara, 99.487 Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 5,8 m di atas permukaan laut. Kecamatan Kualuh Hilir menempati area seluas 385,48 Km2 yang terdiri dari 7 Desa dan 69 dusun/lingkungan definitif. Area Kecamatan Kualuh Leidong di sebelah utara berbatasan Kecamatan Kualuh Hilir, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Hulu dan Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Kuo. (BPS Labuhan Batu Utara, 2024).

Menurut Data BPS Tahun 2024, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kampung Mesjid memiliki luas area sebesar 20,22 Km2 dengan total populasi mencapai 5037 jiwa.

**Gambar 1: Jumlah Penduduk Kecamatan Kualuh Hilir**

**Tabel 3.5** **Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kualuh Hilir, 2023**  
**Table** **Population by Age Groups and Sex Kualuh Hilir district, 2023**

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuala Bangka	3.588	3.467	7.055
Teluk Binjai	2.252	2.148	4.400
Sungai Sentang	2.743	2.705	5.448
Sungai Apung	2.151	2.026	4.177
Kampung Mesjid	2.601	2.436	5.037
Teluk Piai	2.074	1.945	4.019
Tanjung Mangedar	2.673	2.447	5.120
<b>Kualuh Hilir</b>	<b>18.082</b>	<b>17.174</b>	<b>35.256</b>

Kelurahan Kampung Mesjid per tahun 2023, memiliki 5.037 jumlah penduduk dengan penjabaran penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.601 dan 2.436 penduduk perempuan. Dalam melaksanakan salah satu jenis bantuan sosial, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan melakukan Program Keluarga Harapan di wilayah kerjanya. Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 5/3.4/ KP.02.1/2024 tentang pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2024, Tiya Iryani merupakan petugas Pendamping Sosial Keluarga Harapan dengan Kecamatan Kualuh Hilir sebagai wilayah kerjanya.

Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 5/3.4/ KP.02.1/2024 tentang pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2024, Tiya Iryani merupakan petugas Pendamping Sosial Keluarga Harapan dengan Kecamatan Kualuh Hilir sebagai wilayah kerjanya.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
**redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id**

403

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX

Indonesia OneSearch

## Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

### 1. Komunikasi

Dalam komunikasi yang terjadi di Desa Kampung Mesjid, yakni berupa penyampaian informasi secara langsung dan tidak langsung kepada pelaksana kebijakan, masyarakat yang berperan sebagai penerima manfaat dan kelompok lain yang berkepentingan. Bentuk komunikasi yang terjadi ialah pertama dengan pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang tercantum di dalam SK PKH Labura yang tercantum di dalam Keputusan Direktur Jaminan Sosial dari tahun 2015-2024. Peneliti mengambil SK yang paling baru yakni Nomor 5/3.4/ KP.02/1/2024 tentang pengangkatan pendampingan sosial. Dalam SK ini disebutkan bahwa tugas dan fungsi pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi kebijakan kepada pemerintah tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat umum. Melakukan verifikasi validasi calon penerima bantuan sosial, penyaluran dan pertemuan bulanan. Melakukan pendampingan, mediasi, fasilitasi, dan advokasi kelompok penerima manfaat PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Mesjid, yang terjadi antara pendamping sosial PKH, pemerintah kelurahan, dan masyarakat penerima manfaat sudah berjalan cukup baik dalam hal sosialisasi program, verifikasi calon penerima, serta penyaluran bantuan. Pendamping sosial PKH melakukan pendataan dan pendampingan dengan berpegang pada kode etik dan tugas yang tercantum dalam SK PKH Labura Nomor 5/3.4/ KP.02/1/2024. Namun, kendala masih ditemukan dalam proses pendataan dan penyampaian informasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima. Beberapa masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak mendapatkannya akibat kurangnya pemahaman mengenai prosedur administratif, seperti pengurusan surat keterangan tidak mampu, serta pola komunikasi yang cenderung menunggu dari pihak kelurahan. Selain itu, hambatan juga muncul dari masyarakat yang enggan melapor karena alasan malu atau kurangnya inisiatif. Situasi ini mengindikasikan bahwa komunikasi antara pemerintah kelurahan dan pendamping sosial perlu lebih proaktif melalui pendekatan "jemput bola" untuk memastikan pendataan yang lebih akurat dan inklusif.

### 2. Sumber Daya

Menurut teori dari George C. Edward III (dalam Riant Nugroho) dalam pandangan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sumber daya (resources). Sumber-sumber yang dimaksud meliputi staf yang memadai, dan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Staf yang memiliki kecakapan dan jumlah memadai akan mendorong implementasi berjalan baik, namun sebaliknya jika kualitas staf rendah dan jumlah terbatas, maka pelayanan menjadi terhambat.

Dalam melakukan implementasi program keluarga harapan di Kampung Mesjid, SDM khususnya pendamping sosial PKH merupakan tenaga kesejahteraan sosial yang ada di garda terdepan di distrik untuk melakukan pemetaan di bidang kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan kemiskinan. Pendamping Keluarga Harapan inilah yang sejatinya akan memberikan edukasi dan pelayanan dalam memberikan dorongan terutama bagi yang perlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya ibu menyusui, anak dalam mengkonsumsi makanan bergizi, lanjut usia, disabilitas serta anak yang perlu pemenuhan gizi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, khususnya pendamping sosial yang bertugas sebagai garda terdepan. Hal ini sejalan dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kualitas

dan ketersediaan sumber daya. Pendamping PKH memiliki peran vital dalam edukasi, fasilitasi, dan advokasi masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam SK PKH Labura. Berdasarkan wawancara dengan Korkab dan masyarakat, pendamping sosial dinilai bekerja sesuai SOP dan menunjukkan komunikasi yang baik, ramah, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemampuan ini didukung oleh pelatihan yang mereka terima, seperti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), dan bimbingan pemantapan (bimtap), yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan pelaksana PKH dari pusat hingga daerah. Pelatihan ini membantu pendamping memahami tugas dan tantangan di lapangan, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional. Dukungan peraturan yang menjadi landasan dalam bekerja sangat jelas dan pembekalan pelatihan membuat pendamping PKH mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Hal ini mencerminkan bahwa SDM yang kompeten dan terlatih menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik seperti PKH.

### 3. Kecenderungan-Kecenderungan

George C. Edward III (dalam Riant Nugroho) dalam pandangan implementasi kebijakan selain dipengaruhi oleh komunikasi, dan sumber daya implementasi juga dipengaruhi oleh kecenderungan (dispositions). Faktor disposisi lebih menitikberatkan pada sikap dan perilaku dari implementor, kebijakan atau program akan berjalan dengan baik apabila implementor memiliki sikap dan komitmen sesuai dengan pembuat kebijakan. Implementor dalam Program Keluarga Harapan meliputi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara, PPKH Kabupaten, PPKH Kecamatan dan peserta PKH.

Disposisi pelaksana memang menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keramahan, kesopanan, dan simpati dari pelaksana kebijakan membuat masyarakat penerima PKH merasa nyaman dan senang, sehingga implementasi kebijakan akan dapat dengan mudah diterapkan, karena sebuah implementasi kebijakan akan dikatakan berhasil apabila dua belah pihak dalam hal ini pelaksana dan penerima PKH saling bekerjasama, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Ketika sikap pelaksana cenderung negatif maka akan mengakibatkan masyarakat penerima bantuan enggan melaksanakan perintahnya sehingga masyarakat tidak mengetahui hakikat tujuan program PKH.

Berdasarkan kesimpulan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pelaksana yang memiliki sikap ramah, sopan, dan simpatik mempermudah penerapan kebijakan karena menciptakan kenyamanan dan kepercayaan dari masyarakat penerima manfaat. Hubungan yang baik antara pelaksana dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan pendamping PKH, sikap pendamping cenderung positif, dengan komunikasi yang jelas dan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kode etik. Pendamping PKH yang memiliki sikap positif bukan hanya mampu menjalankan tugas sesuai dengan kode etik, tetapi juga menjadi representasi langsung dari keberhasilan program.

### 4. Struktur Birokrasi

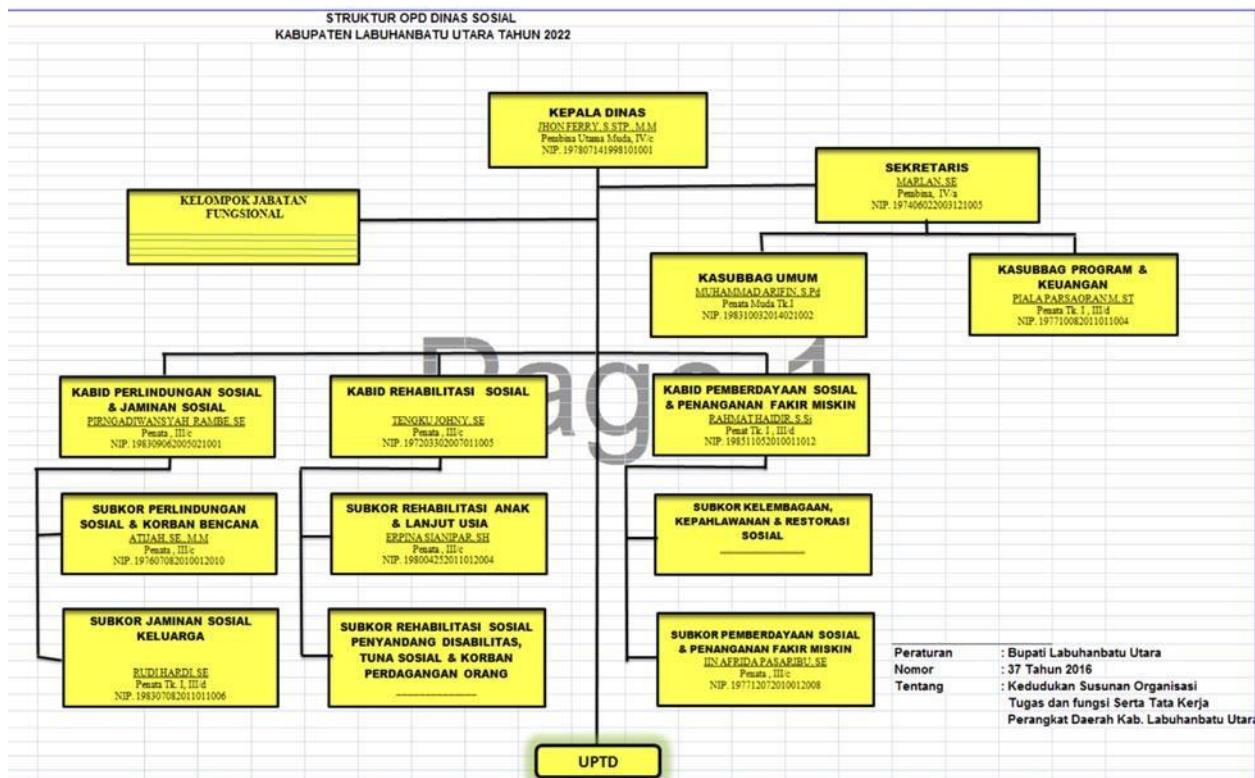
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara, 2022:63) keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi menurut Edwards memiliki dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. SOP menjadi sebuah pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi yang memberikan perbedaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. Sama halnya dengan organisasi, Program Keluarga Harapan juga memiliki struktur birokrasi muai dari Pemerintah Pusat sampai pada unit paling akhir yaitu PPKH Kecamatan.

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

Gambar 2: Struktur OPD Dinas Sosial Labuhanbatu Utara



Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pendamping PKH Labura memang tidak memiliki SOP yang riil. Namun Korkab dan Pendamping mengetahui pekerjaan dan kewajiban mereka berdasarkan SK PKH Labura yang diambil dari Keputusan Direktur Jaminan Sosial No 5/3.4/KP.02/1/2024.

Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait struktur birokrasi telah ditetapkan mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan, namun beban kerja yang besar menjadi hambatan utama. Pendamping PKH di Kecamatan Kualuh Hilir menghadapi tanggung jawab yang berat, terutama ketika satu pendamping harus menangani hingga dua wilayah, termasuk Kelurahan Kampung Mesjid dengan sembilan lingkungan.

Struktur birokrasi yang ada memberikan penentuan tugas yang jelas melalui SK PKH Labura dan adanya koordinasi hingga ke tingkat kabupaten. Namun, hambatan yang terjadi adalah kurangnya tenaga pendamping yang menyebabkan beberapa keluhan masyarakat akan pendataan tidak terselsaikan dengan baik. Akibatnya, meskipun pendamping awalnya mampu menjalankan tugas dengan baik, tekanan kerja yang berlebihan berpotensi menurunkan kualitas layanan dan motivasi mereka.

Hambatan seperti ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi yang ada mendukung pelaksanaan PKH secara hierarkis, masih diperlukan upaya penyesuaian dalam pembagian beban kerja dan pengadaan pendamping tambahan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan PKH dapat tercapai secara optimal di semua wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

406

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. pelaksanaan program PKH di Desa Kampung Mesjid sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang terjadi antara pimpinan dengan pelaksana dilakukan dengan koordinasi yang dilakukan secara rutin dengan rentang waktu seminggu sekali untuk antar wilayah dan sebulan sekali dengan Dinas Sosial. Komunikasi yang terjadi antara pendamping PKH dan masyarakat berjalan dengan baik, karena masyarakat mengetahui adanya program PKH ini, sosialisasi, verifikasi dan penyaluran bantuan berjalan dengan lancar. SDM Pendamping PKH di Kampung Mesjid juga memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pekerjaanya sehingga masyarakat sangat mempercayai pendamping PKH. Hal yang sama juga terdapat dalam disposisi atau sikap pendamping PKH yang baik, santun dan ramah yang menjadikan Pendamping PKH di Kampung Mesjid diterima dengan baik oleh masyarakat yang berimbang kepada lancarnya program PKH di Kampung Mesjid. Struktur birokrasi yang ada sudah sangat jelas sehingga pos-pos posisi dilakukan secara jelas dalam pembagian kekuasaan dan tugas. Program PKH di Kampung Mesjid terlaksana dengan baik, namun masih ditemukannya beberapa kendala dan hambatan seperti masih ada beberapa masyarakat yang berhak menerima program ini tidak mendapatkannya, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara calon kelompok penerima dengan Lurah setempat. Masyarakat memerlukan surat surat dan dokumen untuk pelengkapan sebagai penerima PKH yang seharusnya diberikan oleh Lurah setempat namun tidak diberikan. Kemudian Kendala terbesar menurut peneliti ialah kurangnya SDM atau Pendamping PKH dalam sebuah wilayah, dengan beban kerja besar ini, satu wilayah hanya diwakilkan dengan satu orang pendamping, bahkan ada seorang Pendamping PKH yang beban kerjanya berupa dua buah wilayah. Akibatnya, meskipun pendamping awalnya mampu menjalankan tugas dengan baik, tekanan kerja yang berlebihan berpotensi menurunkan kualitas layanan dan motivasi mereka.
2. Faktor pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, meliputi beberapa indikator penting. Pertama, komunikasi yang efektif antara pendamping sosial, pemerintah kelurahan, dan masyarakat penerima manfaat telah terbukti mendukung keberhasilan implementasi program. Pendamping sosial menjalankan tugas mereka berdasarkan SK PKH Labura, yang mencakup sosialisasi kebijakan, pendataan penerima, dan edukasi mengenai penggunaan bantuan. Kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih menjadi salah satu pilar keberhasilan. Pelatihan seperti diklat, bimtek, dan bimtap memberikan pendamping kemampuan untuk bekerja secara profesional. Ketiga, disposisi atau sikap para pendamping, yang ramah, sopan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan kepercayaan dan kenyamanan di kalangan penerima manfaat. Terakhir, struktur birokrasi yang jelas dari tingkat pusat hingga kecamatan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program secara hierarkis. Namun, terdapat pula faktor penghambat. Hambatan utama terletak pada kurangnya jumlah pendamping sosial dibandingkan dengan beban kerja yang ada, di mana satu pendamping harus menangani beberapa wilayah, termasuk kelurahan dengan banyak lingkungan. Selain itu, pendataan yang belum optimal seringkali menyebabkan masyarakat yang berhak tidak menerima bantuan karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur administratif, seperti pengurusan surat keterangan tidak mampu. Pola komunikasi di tingkat kelurahan yang cenderung "menunggu bola" juga mengakibatkan pendataan yang tidak maksimal. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konkret untuk pendamping sosial menyebabkan mereka bekerja hanya berdasarkan panduan dalam SK PKH Labura, sehingga kurang memberikan kejelasan mengenai batasan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya penyesuaian dalam pembagian beban kerja, penambahan tenaga pendamping, serta

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

407

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

peningkatan pendekatan proaktif dalam komunikasi dengan masyarakat. Meskipun struktur birokrasi yang ada mendukung pelaksanaan PKH secara hierarkis, masih diperlukan upaya penyesuaian dalam pembagian beban kerja dan pengadaan pendamping tambahan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Dan hambatan terakhir berupa tidak adanya SOP yang riil menyebabkan pendamping PKH bekerja berdasarkan SK PKH Labura, sampai sekarang memang belum ditemukan permasalahan namun kehadiran SOP dirasa perlu untuk memperjelas kewajiban dan tanggung jawab pendamping PKH.

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Bps.go.id. (2023). Berita Resmi Statistik. *Berita Resmi Statistik*, 7, 1–52.
- Cahyo, S., & Ertien, R. N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *Journal Of Public Sector Innovation*, 3(2), 68–74.
- Choiriyah. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17–30.
- Dyah, A. V., & Ratih, N. P. S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(12), 1–6.
- Kemenkeu. (2017). Program Keluarga Harapan. *Program Keluarga Harapan (PKH)*, 17.
- Kemensos. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia*, 1(1), 1–35.
- Khoirul, I. Z. R. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. *Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v5i1.9007>
- Kominfo. (2016). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu Ii. *Kemkominfo*, 18.
- Mardiatillah, R., Panorama, M., & Rinol, S. (2021). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat
- Kemiskinan Di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 365–370. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8825>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-36. Pt. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Yurensi, L., Tulusan, F. M. G., & Salmin, D. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

408

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX

